

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Persaingan di dunia bisnis sekarang ini sangat kompetitif dimana persaingan bisnis yang ada mengakibatkan dunia bisnis berkembang sangat cepat karena mengikuti perkembangan teknologi yang cepat juga pertumbuhannya. Dalam persaingan yang kompetitif ini, perusahaan berlomba-lomba dalam meningkatkan tingkat efisiensi dalam melakukan kegiatan operasionalnya supaya dapat menghasilkan tingkat laba yang maksimal. Tingkat persaingan yang ketat mengakibatkan munculnya semacam tuntutan yang ditujukan kepada perusahaan supaya dapat terus melakukan inovasi, melakukan perluasan usaha baik perluasan secara horizontal maupun vertikal, dan memperbaiki kinerja sehingga pada akhirnya perusahaan dapat terus bersaing dan bertahan dalam dunia bisnis. Supaya dapat bersaing dan bertahan tersebut, terlebih lagi pada zaman seperti sekarang ini, tata kelola perusahaan yang baik perlu diterapkan supaya perusahaan tetap dapat bersaing serta bertahan dalam kompetisi bisnis baik dimasa sekarang maupun dimasa depan. Salah satu faktor yang dapat menjadikan perusahaan terus dapat bersaing adalah profit, dengan adanya profit maka perusahaan dapat terus menjalankan kegiatan operasionalnya, maka dari itu, memaksimalkan keuntungan merupakan salah satu tujuan utama perusahaan. Dalam mencapai keuntungan yang maksimal, hal yang dapat dilakukan salah satunya adalah mencari cara supaya perusahaan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaannya.

Tersedianya laporan keuangan perusahaan diharapkan dapat memberi informasi tentang kinerja keuangan yang dibutuhkan oleh banyak pihak mulai dari investor, stock holder, dan manajemen perusahaan itu sendiri. Penggunaan tata kelola perusahaan yang baik dapat digunakan untuk mendorong perusahaan, tepatnya kepada dewan dan manajemen supaya dapat mencapai tujuan perusahaan yang merupakan kepentingan pemilik saham. Rasio keuangan dapat menggambarkan bagaimana kinerja keuangan perusahaan.

Indikator yang menggabungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan melakukan pembagian dengan satu angka akuntansi tersebut dengan angka akuntansi lain dikenal sebagai rasio keuangan, rasio keuangan berfungsi sebagai evaluator kondisi dan kinerja perusahaan (Horne dalam kasmir, 2015). Jenis-jenis rasio keuangan terdiri dari rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, rasio pertumbuhan, dan rasio nilai pasar (Fahmi, 2014).

Kegunaan rasio profitabilitas sebagai suatu alat ukur supaya dapat melakukan pengukuran kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dan mengukur apakah hal yang dilakukan pihak manajemen suatu perusahaan sudah efektif. Laba yang didapatkan atas penjualan serta pendapatan investasi dapat menunjukkan jika perusahaan memiliki kemampuan dalam mencari keuntungan sudah efektif. Penggunaan rasio profitabilitas menunjukkan tentang efisiensi perusahaan (Kasmir, 2015). Terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas, yakni: profit margin (profit margin on sales), return on assets (ROA), return on equity (ROE), laba per lembar saham, dan yang terakhir adalah rasio pertumbuhan. Kinerja perusahaan dalam satu waktu tertentu dapat ditunjukkan oleh rasio profitabilitas. Profitabilitas perusahaan dijadikan sebagai salah satu indikasi yang digunakan investor ketika memutuskan untuk melakukan penanaman modal.

Salah satu jenis rasio profitabilitas yakni return on asset (ROA) yang dimana manfaat dari penggunaan rasio ini yakni kita dapat memperoleh informasi atas keefektifan perusahaan dalam mengelola investasinya, semakin rendah angka rasio ini maka semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya (Kasmir, 2015). Dalam mencapai tingkat keuntungan yang maksimal, peningkatan tingkat kembalian dapat didukung dengan keadaan agency cost yang rendah. Konsep dasar teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa seorang prinsipal akan memperkerjakan seorang agen untuk menjakankan tugas-tugas yang sesuai dengan kepentingan principal, namun pada kenyataannya tidak semua agen menjalankan apa yang diinginkan oleh principal, maka dari itu muncul istilah agency cost yang berarti biaya yang dianggarkan supaya para agen dapat bekerja sesuai dengan kepentingan yang dimiliki oleh pemilik. Agency cost sendiri dapat diminimalisir dengan adanya corporate governance.

Berkembangnya permasalahan corporate governance dapat mendorong perusahaan, investor, dan juga pemerintah dalam melakukan penyusunan peraturan atau standar corporate governance. Standar corporate governance di Indonesia sendiri diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Corporate governance* bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan terutama dalam bidang keuangan seperti memaksimalkan profit ataupun membantu perusahaan terhindar dari risiko krisis perusahaan. Pengawasan atas kinerja manajemen supaya lebih efektif dalam pencapaian tujuan perusahaan diharapkan dapat bertambah setelah diterapkannya corporate governance.

Berdasarkan mekanisme *corporate governance*, *corporate governance* terbagi dalam dua kategori yaitu Internal dan Eksternal. Mekanisme eksternal corporate governance adalah pengendalian yang berasal dari eksternal perusahaan dalam hal ini yaitu pasar, sedangkan mekanisme pengendalian yang melibatkan pihak internal perusahaan dikenal sebagai mekanisme *internal corporate governance* contohnya yakni variabel-variabel struktur dewan seperti dualitas CEO, proporsi dewan komisaris independen, hutang, dan dewan eksekutif pemegang saham (Jensen,1993). Kehadiran dewan komisaris diharapkan dapat meminimalisir permasalahan agensi. Tugas dewan komisaris baik komisaris independen ataupun bukan adalah sebagai dewan yang melakukan pengawasan atas kinerja manajernya supaya dapat mengurangi kecurangan ataupun hal-hal yang tidak diharapkan oleh agen perusahaan.

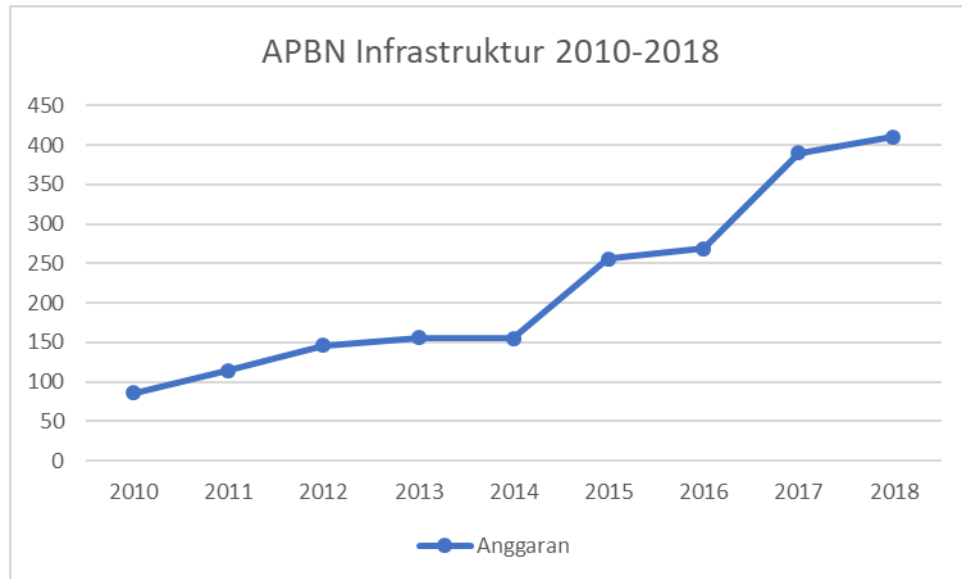
Dewan komisaris merupakan puncak dari mekanisme *internal corporate governance*. Tanggung jawab yang dimiliki oleh dewan komisaris ialah menentukan aturan bagi CEO dan memberikan arahan. Dewan komisaris yang berjalan baik dapat memberikan budaya dan suasana yang dapat mendukung untuk terus melakukan kegiatan seperti mempekerjakan, memecat, dan mengkompensasi CEO dan juga menyediakan arahan yang baik karena dewan komisaris yang buruk tidak dapat melakukan fungsi pengawasan sesuai harapan pemilik, padahal esensi pokok dari adanya dewan komisaris itu sendiri adalah melakukan pengawasan terhadap CEO atau *agent*, namun karena dewan komisaris yang berkinerja dengan buruk maka fungsi pengawasan itu menjadi tidak ada (Jensen, 1993). Maka dari itu, dikarenakan dewan komisaris yang merupakan pemeran utama atau puncak dari

mekanisme internal *corporate governance*, diharapkan dapat melakukan pengawasan supaya dapat meningkatkan kinerja perusahaan, karakteristik dari dewan komisaris yakni proporsi komisaris independen, jumlah dewan komisaris, dan rapat dewan penting untuk dipelajari dan diteliti lebih lanjut.

Karakteristik mekanisme *corporate governance* pada masing-masing negara itu berbeda, menurut Lukviarman (2016) tradisi *corporate governance* yang diterapkan di Indonesia mengikuti mekanisme *continental european system* yang dimana faktor ketergantungan pada struktur perusahaan dan peraturan yang diwariskan oleh belanda dapat mempengaruhi sistem pengelolaan perusahaan di Indonesia, hal yang menjadi ciri-ciri dari *continental european two-tier model* adalah pasar keuangan yang tergolong kecil dan kurang lancar sehingga peran pasar sebagai kendali perusahaan yang merupakan bagian dari mekanisme *governance* itu menjadi tidak kuat. Menurut Maurović et al (2013), *two-tier system* diadakan untuk meminimalkan perbedaan kepentingan antar satu pemegang saham dengan pemegang saham lainnya.

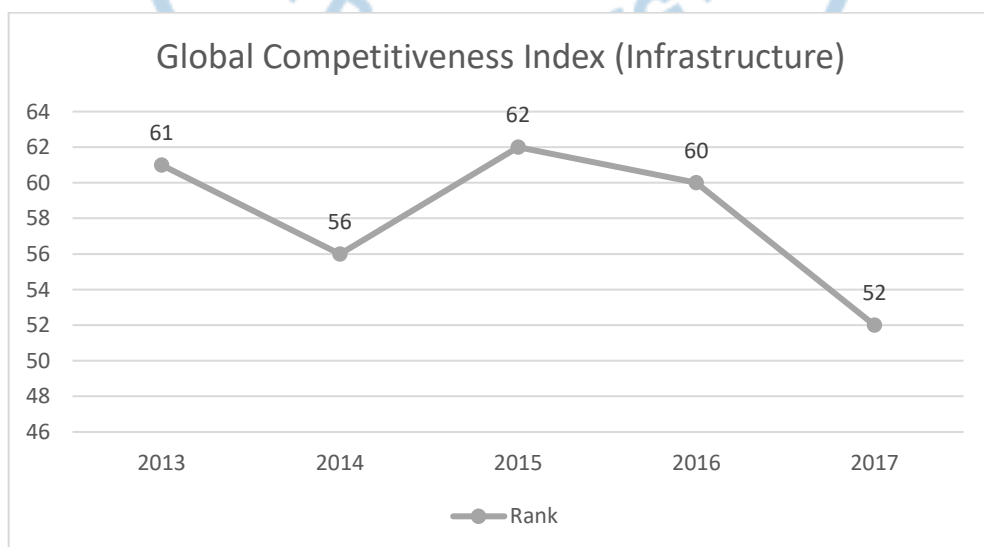
Dalam penerapannya, mekanisme *corporate governance* dapat diaplikasikan pada semua sektor perusahaan. Terdapat 9 sektor industry di bursa efek Indonesia, 9 sektor tersebut berdasarkan pengkategorian yang dilakukan oleh BEI yang dikenal dengan istilah JASICA (Jakarta Stock Exchange Industrial Classification). Sektor Infrastruktur, Utilitas & Transportasi (IUT) merupakan satu dari sembilan sektor yang terdaftar dengan aktivitas utamanya adalah jasa. Sektor IUT terbagi kedalam lima subsektor, yaitu: 1. Subsektor Energi 2. Subsektor Jalan Tol, Bandara, Pelabuhan 3. Subsektor Telekomunikasi 4. Subsektor Transportasi 5. Subsektor Konstruksi Non Bangunan.

Semenjak dibawah pemerintahan presiden yang ke-7, anggaran untuk infrastruktur terus meningkat demi memudahkan mobilitas masyarakat terutama di daerah terpencil. Pertumbuhan anggaran infrastruktur juga diharapkan dapat menunjang perusahaan sektor industri IUT sehingga dapat memudahkan perusahaan-perusahaan tersebut dalam kendala transportasi bahkan mendapatkan cost yang lebih rendah.



Gambar 1. 1 APBN Infrastruktur 2010-2018

Berdasarkan Global Competitiveness Index yang dipublikasi oleh World Economic Forum, peringkat Indonesia dalam bidang Infrastruktur mengalami tren peningkatan sejak tahun 2013. Hal tersebut tentu menjadi salah satu pertimbangan bagi calon investor untuk berinvestasi di Indonesia, karena semakin baik infrastruktur yang ada, maka pendistribusian barang akan semakin membaik sehingga pada akhirnya dapat mengurangi biaya pendistribusian barang yang pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas perusahaan, terutama perusahaan manufaktur yang mendistribusikan barangnya sendiri tanpa menggunakan jasa pihak lain.



Gambar 1. 2 Global Competitiveness Index (Infrastructure)

Berdasarkan riset empiris Martsila dkk (2013), Widagdo(2014), dan Elisetiawati dkk (2016) menyatakan bahwa dewan komisaris (DK) berpengaruh positif terhadap *return on assets* (ROA) dikarenakan dengan banyaknya jumlah anggota dewan komisaris sehingga pengawasan pada dewan pelaksana akan menjadi lebih baik, ide, pandangan, serta saran akan menjadi banyak sehingga pada akhirnya akan berpengaruh pada kinerja dari manajemen menjadi lebih baik dan berdampak pula pada peningkatan kinerja perusahaan. Namun menurut Widyati (2013), Rahardja (2014, Tertius dkk(2015), Veno (2015), dan Perdana dkk (2016) dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan dikarenakan meskipun dewan komisaris bertugas sebagai pengawas tetapi yang tetap bertanggung jawab melaksanakan tugas efisiensi dan daya saing perusahaan itu pihak manajemen sehingga tidak dapat bertanggung jawab sepenuhnya serta.

Berdasarkan hasil penelitian Widyati (2013), Perdana et al (2016) dan Zahra (2016) dewan komisaris independen (KI) berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diukur oleh *return on assets* (ROA) dikarenakan komisaris independen memiliki peranan penting dalam memonitor perusahaan, terlebih lagi mereka tidak memiliki hubungan dalam hal apapun dengan komisaris lainnya sehingga tanggung jawab pengawasan menjadi sangat efektif. Tertius et al (2015) menyatakan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh secara negatif terhadap profitabilitas yang diukur oleh *return on assets* (ROA) berarti semakin tinggi jumlah komisaris independen maka kinerja keuangan semakin menurun yang diukur berdasarkan ROA sehingga pengawasan yang dilakukan komisaris independen menjadi tidak efektif, proporsi yang optimal dan rasional berada pada rentang persentase 30 persen hingga 50 persen. Syafiqurrahman et al (2014), Widagdo (2014), Veno (2015), Yulianingtyas (2016) menyatakan bahwa jumlah komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, hal tersebut dikarenakan apa yang dikerjakan dewan komisaris independen tidak efektif sehingga tidak memberikan dampak bagi perusahaan.

Berdasarkan riset empiris Liang dkk (2013) rapat dewan (RD) berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diukur oleh ROA dikarenakan para dewan komisaris memanfaatkan dengan efektif setiap kali adanya rapat untuk memastikan jika para manajer sungguh-sungguh dalam meningkatkan kinerjanya sehingga

tujuan dari perusahaan tercapai. Rapat menjadi tidak efektif dalam melakukan pembahasan perkembangan perusahaan dan pembahasan mengenai informasi terbaru perusahaan apabila intensitas rapat yang dilakukan hanya sebagai formalitas saja (Yulianingtyas, 2016). Menurut Syafiqurrahman et al (2014) dan Zahra (2016) rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan yang diukur melalui ROA dikarenakan ROA menggambarkan bagaimana pemanfaatan keseluruhan asset yang dimiliki dalam menghasilkan keuntungan. Hal ini menunjukkan bahwa rapat yang dilaksanakan tidak memberikan efek dan frekuensi rapat yang dilakukan dalam satu tahun belum tentu membahas kinerja perusahaan sehingga agenda rapat yang dibahas kadang tentang hal yang kurang berkaitan dengan kinerja dari dewan direksi.

Berdasarkan adanya kesenjangan dalam hasil penelitian terdahulu, maka penelitian dengan karakteristik dewan komisaris seperti jumlah dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan jumlah rapat dapat mempengaruhi kinerja keuangan yang diukur oleh profitabilitas harus dilakukan. Maka dari itu peneliti memberikan judul “ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS TERHADAP PROFITABILITAS” dengan studi yang dilakukan di sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi periode 2010 hingga 2018.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini yang diajukan berdasarkan penjabaran latar belakang diatas adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh jumlah dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan jumlah rapat terhadap profitabilitas perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2018?
2. Apakah terdapat pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap profitabilitas perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2018?
3. Apakah terdapat pengaruh proporsi komisaris independen terhadap profitabilitas perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2018?

4. Apakah terdapat pengaruh jumlah rapat terhadap profitabilitas perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2018?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Jadi tujuan atas dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan jumlah rapat terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2018.
2. Untuk menganalisis pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2018.
3. Untuk menganalisis pengaruh proporsi komisaris independen terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2018.
4. Untuk menganalisis pengaruh jumlah rapat terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2018.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut ini:

1. Kegunaan Praktis  
Dapat memberikan masukan bagi pihak yang terlibat dalam sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi dalam meningkatkan kinerja profitabilitas dalam memanfaatkan dewan pengawas.
2. Kegunaan Akademis  
Dapat memperbanyak teori yang menunjang ilmu pengetahuan manajemen keuangan khususnya pada bidang *good corporate governance* dan profitabilitas perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi.